

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR PADA MASA GUBERNUR BASOFI SUDIRMAN TAHUN 1993-1998

RAGIL NAILA YULIA NATASYA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : ragil.nayla@yahoo.co.id

Wisnu

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kemiskinan merupakan sebuah kasus yang mana sulit untuk dipecahkan. Dalam mengatasi kemiskinan perlu menggunakan sinergi dan sistematis agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang bermartabat sehingga tidak akan ada kemiskinan yang terjadi. Dengan tingginya angka kemiskinan yang terjadi maka diperlukan langkah-langkah yang positif. Jika kondisi seperti itu tetap ada maka akan membuka peluang yakni akan timbul masalah yang bisa mengancam suatu proses keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan. permasalahannya 1) Bagaimana pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada masa Basofi Sudirman ? 2) Bagaimana kendala dan hasil dari program pengentasan kemiskinan pada masa Basofi Sudirman ? tahun 1966 – 1998. Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu: 1) Heuristik melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan; 2) Kritik Sumber; 3) Interpretasi; 4) Historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian Program pengentasan kemiskinan pada masa Gubernur Basofi Sudirman yakni ada 2, program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yakni IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan dijalankan pada masa pemerintahan Basofi Sudirman dan yang kedua yakni program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan sendiri oleh Basofi Sudirman yakni GKD (Gerakan Kembali Ke Desa), GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), Urunan Pengusaha. Berikut ini adalah program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pusat dan dilaksanakan pada masa Gubernur Basofi Sudirman. Kendala yang dihadapi kebanyakan yakni belum mengertinya masyarakat tentang program yang dicanangkan oleh pemerintah Jawa Timur. Sehingga membuat masyarakat salah dalam pelaksanaannya. Hasil yang dicapai dalam program pengentasan kemiskinan yakni ada dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial meliputi : berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya siswa yang bersekolah. Kemudian di bidang ekonomi meliputi : bertambahnya industri di Jawa Timur, bertambahnya PDRB.

Kata Kunci: Program Kemiskinan, Jawa Timur, perubahan

Abstract

Poverty is a case which is difficult to solve. In coping with poverty, it is necessary to use synergy and systematically so that all people are able to enjoy a life of maturity so that there will be no poverty. With the high rate of poverty that occurs then required positive steps. If such conditions remain there will open up opportunities that will arise problems that could threaten a process of sustainability of the development program implemented. Problems 1) How the implementation of poverty alleviation program in the Basofi Sudirman? 2) What are the constraints and outcomes of the Basofi Sudirman poverty alleviation program? 1966 - 1998. This thesis uses historical research methods are: 1) Heuristics through observation, interview and literature study; 2) Source Criticism; 3) Interpretation; 4) Historiography.

Based on the results of the study of poverty alleviation program at the time of Governor Basofi Sudirman ie there are 2, poverty alleviation programs proclaimed by the central government that is IDT (Inpres Desa Tertinggal) and run during the reign of Basofi Sudirman and the second poverty alleviation programs proclaimed by Basofi Sudirman namely GKD (Gerakan Kembali Ke Desa), GNOTA (Gerakan Orang Parua Asuh Movement), Entrepreneur Association. The following is a poverty alleviation program proclaimed by the center and implemented at the time of Governor Basofi Sudirman. The obstacles faced most are not yet understand the community about the program launched by the government of East Java. So that makes people wrong in the implementation. The results achieved in poverty alleviation programs are in the social and economic fields. In the social field include: reduced number of poor people, increasing students in school. Then in the economic field include: the increase of industry in East Java, the increase of GRDP.

Keywords: Poverty Program, East Java, change

PENDAHULUAN

Mulai tahun 1993 sudah banyak permasalahan sosial yang terjadi di Jawa Timur dan sebagian besar permasalahan sosial tersebut adalah kasus kemiskinan dan anak terlantar.¹ Karena pada tahun tersebut yang mana menurut data dari BPS Jawa Timur pada tahun 1993 jumlah penduduk miskin sebanyak 4.424.409 jiwa dan anak terlantar sebanyak 168.412.² Sehingga membuat pemerintah Jawa Timur memikirkan bagaimana usaha untuk mengentaskan kemiskinan dan kasus anak terlantar yang semakin tahun semakin bertambah.

Kemiskinan merupakan sebuah kasus yang mana sulit untuk dipecahkan. Karena kasus kemiskinan tersebut telah menimbulkan berbagai isu-isu ketimpangan sosial yang justru muncul kepermukaan yang tidak memandang di kota maupun di desa. isu-isu ketimpangan sosial meliputi munculnya tindakan kriminalitas, pengangguran, anak terlantar dll. Dalam mengatasi kemiskinan perlu menggunakan sinergi dan sistematis agar seluruh masyarakat mampu menikmati kehidupan yang bermartabat sehingga tidak akan ada kemiskinan yang terjadi.³

Pada masa orde baru merupakan masa-masa awal perbaikan kondisi perekonomian di Indonesia yang telah memburuk pada orde lama, masa ini sering kali disebut dengan orde pembangunan. Karena dalam masa ini salah satu cita-cita yang harus diwujudkan yakni menciptakan masyarakat yang industri bukan tradisional dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Karena pada masa orde lama kondisi perekonomian di Indonesia hanya terbatas melakukan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, namun pada masa orde baru sudah lebih aktif kerjasama dengan luar negeri. Pada dasarnya pembangunan yakni suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus dalam hal perbaikan yang memiliki tujuan yang harus dicapai.⁴ Pada pembangunan nasional ini memiliki tujuan yang harus dicapai yakni menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta merata yang berdasarkan pada Pancasila.⁵

Dengan tingginya angka kemiskinan yang terjadi maka diperlukan langkah-langkah yang positif. Jika kondisi seperti itu tetap ada maka akan membuka peluang yakni akan timbul masalah yang bisa mengancam suatu proses keberlanjutan program pembangunan yang dilaksanakan. Di sisi lain jika tingkat kemiskinan suatu masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan ketimpangan sosial.⁶ Bahwasannya pengentasan kemiskinan merupakan suatu kewajiban sosial, hukum bahkan politik untuk bangsa Indonesia.⁷ Dengan adanya

masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah banyak melakukan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan tersebut yakni dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat dan melakukan pendektan yang berbasis hak.

Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup banyak. Keadaan kemiskinan di Jawa Timur kondisinya hampir sama dengan keadaan di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 9.858.618 jiwa atau sebesar 31,20% dari jumlah penduduk Jawa Timur secara keseluruhan. Kemudian meningkat sampai tahun 1992 sehingga secara persentase menjadi 31,24% atau sama dengan sejumlah 10.059.208 jiwa.⁸

Tahun 1993 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur baik program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Program yang dibentuk oleh pemerintah pusat yakni program Inpres Desa Tertinggal (IDT) sedangkan program yang dibentuk oleh pemerintah daerah Jawa Timur seperti program Gerakan Kembali Kedesa (GKD), Program Urutan Pengusaha. Pada dasarnya program yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama yakni mengatasi kemiskinan yang semakin tahun semakin bertambah. Dengan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “ Program Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur Pada Masa Gubernur Basofi Sudirman Tahun 1993-1998 “.

Berdasarkan latar belakang itulah peneliti mengangkat judul “Program Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur Pada Masa Gubernur Basofi Sudirman Tahun 1993-1998”. Rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada masa Basofi Sudirman ?
2. Bagaimana kendala dan hasil dari program pengentasan kemiskinan pada masa Basofi Sudirman ?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan program pengentasan kemiskinan pada masa Basofi Sudirman
2. Untuk menganalisis kendala dan dampak dari program pengentasan kemiskinan pada masa Basofi Sudirman

METODE PENELITIAN

¹ Jawa Timur dalam Angka 1993

² “4 Program Pengentasan Kemiskinan Di Jatim”, *Surabaya Post*, 29 Agustus 1994, hlm. 9.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. (Jakarta : Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik. 2011), hlm. 2.

⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 89.

⁵ Poesponegoro dan Nugroho N, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm . 440.

⁶ Valeriana Darwis dkk, *Pengentasan Kemiskinan : Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang*, Vol 19, No.1, 2001, hlm. 59.

⁷ Dadang Sholihin, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta : Yayasan Empat Sembilan Indonesia, 2014), hlm . 51.

⁸ Moch lutfie Misbach, *Masalah Kemiskinan Dan Beberapa Pendekatan Penanggulangannya Di Provinsi Jawa Timur*, *Majalah Ekonomi* Vol 12, No 2, 2009, hlm. 125.

Metode yang digunakan dalam mengkaji banir di Tulungagung ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah adalah sekumpulan ketentuan dan aturan sistematika guna memudahkan dalam usaha pengumpulan sumber, penilaian kritik, dan menyajikannya yang biasa dalam bentuk tulisan.⁹ Metode sejarah memiliki empat tahapan proses penelitian yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Pada tahap ini penelitian melakukan penelusuran sumber yang terkait dengan tema penelitian yaitu tentang program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur Tahun 1993-1998

Langkah kedua adalah kegiatan kritik sumber. Penulis pada kesempatan ini data yang diperoleh mayoritas merupakan data wawancara maka untuk memperoleh suatu kebenaran sejarah penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang telah dipilih. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada narasumber dan kemudian jawaban dari narasumber akan dibandingkan untuk mencari persamaan dan kesinambungan faktanya sehingga sumber – sumber yang diperolehnya selama wawancara dapat saling melengkapi.

Langkah ketiga adalah interpretasi atau penafsiran terhadap fakta. Pada tahap ini peneliti menghubungkan fakta-fakta sehingga dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan program pengentasan di Jawa Timur tahun 1993-1998. Penafsiran tersebut dilakukan setelah peneliti membaca referensi dan melakukan analisis berdasar pada pokok bahasan.

Langkah keempat adalah historiografi. Pada tahap ini peneliti melakukan rekonstruksi peristiwa sejarah dengan menyusun fakta-fakta yang sudah dipilih secara kronologis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Di Jawa Timur Pada Tahun 1993-1998

1. Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Negara menjalankan suatu Program yakni Inpres Desa Tertinggal (IDT), program ini dipandang sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas upaya dalam mengatasi kemiskinan di berbagai desa yang tertinggal dengan cara melalui koordinasi diberbagai kebijaksanaan, sehingga program pembangunan ini dapat terlaksana secara efektif dan dapat memberikan dampak yang besar dalam mengangulangi kemiskinan.¹⁰

Dalam rangka meningkatkan pemerataan kesejahteraan maka sejak awal Repelita VI telah diluncurkan suatu program khusus penanggulangan kemiskinan yang telah dituangkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1993 Tanggal 27

Desember 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Inpres Desa Tertinggal ini berisi mengenai Program pengentasan kemiskinan. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) ini merupakan perluasan dan peningkatan program dalam rangka pengentasan kemiskinan yang langsung ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan.¹¹

Program Inpres Desa Tertinggal ini diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada masyarakat serta upaya untuk mengurangi kemiskinan di berbagai desa-desa yang tertinggal. Yang dimaksudkan dalam program IDT tersebut untuk mengkoordinasi serta memadukan berbagai program pembangunan yang sebelumnya sudah ada dalam kerangka penanggulangan kemiskina. Program IDT memiliki kelompok sasaran yang bertujuan untuk mendorong perubahan pada struktur masyarakat, memberdayakan masyarakat dan membangun sumber daya manusia melalui peningkatan kondisi ekonomi.

Pada Program IDT sendiri memiliki 3 komponen yang harus dimasukan dan dijalankan yaitu (1) dana yang terus bergulir sebagai bantuan modal usaha masyarakat, (2) sarana dan prasarana perdesaan serta (3) sarana pendampingan teknis di lapangan. Pada dasarnya program IDT mengandung 3 pengertian dasar yakni (1) sebagai pendorong gerakan nasional dalam penanggulangan kemiskinan, (2) sebagai penggerak strategi dalam pemerataan pembangunan yang terjadi, dan (3) bantuan dana bergulir bagi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan yang tinggal di desa-desa tertinggal. Pada program IDT yang akan dijalankan merupakan suatu peluang yang amat sangat tepat bagi berbagai pihak dalam memberikan dukungan dalam pengentasan kemiskinan.

Di Jawa timur yang mengembangkan usaha dari dana IDT yakni di Kabupaten Sidoarjo. Di Sidoarjo sendiri tercatat 24 desa masuk kategori desa tertinggal yang telah tersebar di 13 kecamatan. Di 24 desa miskin itu terdapat 3.787 KK. Seperti di Desa Kludan mendapatkan dana IDT yang berjumlah Rp 28.000.000,-, dimana yang Rp 8.000.000,- bantuan dari APBD dan yang Rp 20.000.000,- dari APBN. Di Desa Kludan sendiri dana tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha rumahannya seperti usaha pembuatan tas, sepatu, ikat pinggang dan lainnya.¹² Kemudian di Kabupaten Mojokerto sendiri usaha yang diusulkan oleh kelompok masyarakat sekitar 60% adalah ternak dan sisanya 40% untuk jenis usaha tani dan pembuatan batu merah.¹³ dana yang di berikan oleh pemerintah ini dimanfaatkan oleh penerima seperti pengusaha batu bata merah ini untuk tambahan dalam membuat batu bata tersebut. Jadi dana tersebut untuk menambah modal usaha yang sudah ada.

2. Gerakan Kembali ke Desa (GKD)

Program gerakan kembali ke desa atau “one village one product” yakni dimana desa-desa yang ada di

⁹Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm 10-11.

¹⁰*Ibid*, hlm. 7.

¹¹ Budi, Soeradji & Mubyarto, *Gerakan Penanggulangan Kemiskinnan Laporan Penelitian Di Daerah-Daerah*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1998), hlm. 2.

¹² “Sebagian Besar Dana Untuk Beli Ternak, *Surabaya Post*, 6 Juli 1994, hlm. 3.

¹³ *Ibid*. hlm 3

Jawa Timur diharapkan mampu menghasilkan satu produk khas desanya, program ini dicanangkan oleh Gubernur Basofi Sudirman yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat desa. Program yang merupakan bagian dari gerakan “kembali ke desa” (*back to village*) diharapkan memberikan prospek yang sangat baik dalam masalah pengentasan kemiskinan yang tampaknya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan adanya program “*one village one product*” ini kemampuan desa untuk mengali potensi terutama dalam bidang ekonomi, akan lebih mudah dan sesuai karena yang diperhatikan dan difokuskan hanya satu. Sehingga masyarakat akan lebih bersungguh-sungguh dan beronsentrasi dalam mengerjakan produk yang bakal menjadi primadona di desanya, sehingga mutu yang diharapkan dari desa tersebut akan lebih baik. Konsep dari Program GKD yakni bersifat terpadu dan tidak setengah hati, dan dijalankan secara berkesinambungan dan yang terpenting mengangkat sektor pedesaan ke bagian terpenting dalam peta pembangunan.¹⁴

Pengembangan potensi desa melalui program “*one village one product*” ini akan membawa prospek yang baik karena mengingat di era globalisasi sekarang. dalam kaitan gagasan program gerakan kembali ke desa ini masih perlu memperhatikan pula karakteristik dan tipologi masyarakat desa setempat. Di Jawa masyarakatnya pada umumnya masih pada tingkat tradisional dan agraris, yang masih berkaitan dengan sikap emosional historis dalam memandang dan memperlakukan lahan pertanian yang dimiliki secara turun-temurun. Kegiatan gerakan kembali ke desa ini banyak di isi pemanfaatan produk unggul dari daerah.¹⁵

Di Jawa Timur sendiri program GKD merupakan program andalan utama. Bila berpijak pada basis pemahaman peta Jawa Timur tersebut, program ini tampaknya sangat relevan. Untuk menunjang program GKD tersebut Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman mengambil berbagai langkah. Di antaranya membentuk tim untuk membuat konsep paduan umum GKD dan memetakan potensi daerah se Jawa Timur. Daerah mana yang memiliki home industry, yang bisa dikembangkan menjadi produk unggulan di daerah tersebut.¹⁶ Melalui GKD ini dapat meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) dan SDD (Sumber Daya Desa) agar mampu mengikuti perkembangan kemajuan, serta mampu memanfaatkan arus globalisasi yang semakin besar dan deras.¹⁷

Program GKD memiliki 5 program, yakni yang pertama, satu desa satu produksi unggulan (*one village one product*). Artinya melalui program ini diharapkan setiap desa punya satu produk unggulan yang bisa dipasarkan baik untuk domestik maupun internasional. Kedua, pengusaha masuk desa. artinya pengusaha tidak hanya berjubel di perkotaan, tetapi harus terjun ke desa

memberikan motivasi kewirausahaan kepada penduduk desa. dalam program GKD, program pengusaha masuk desa ini meliputi 4 pola. Yaitu, inti plasma (pengusaha menjadi bapak angkat, sedangkan penduduk di desa sebagai mitra usaha), pola dagang (pengusaha bapak angkat sebagai pemasar barang dari para penduduk desa), pola vendor (pengusaha bapak angkat menampung produksi penduduk desa, tetapi produk itu tidak termasuk bagian dari produk pengusaha bapak angkat), kemudian pola ke empat pola sub-contracting (pengusaha bapak angkat menerima produksi penduduk desa dan bahkan menganggapnya sebagai bagian dari produk bapak angkat). Kemudian program GKD yang ketiga adalah teknologi masuk desa, yang mana tujuannya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk penduduk desa. dengan begitu diharapkan produk penduduk desa bisa menjadi produk unggulan untuk dipasarkan secara lebih luas. Program GKD yang kelima adalah pengembangan pasar desa. dengan masuknya pengusaha dan teknologi ke desa maka produk penduduk desa bisa semakin berkembang.¹⁸

Adanya program terobosan GKD di Jawa Timur, sangat diharapkan memberi sentuhan nilai-nilai yang mempersiapkan sumber daya manusia agar siap melepaskan diri dari kemiskinan.¹⁹ Dengan adanya GKD berarti memposisikan desa sebagai variabel determinan (dominan) dalam pembangunan. Desa sebagai subjek yang harus mampu menunjukkan kemandiriannya dalam kegiatan produksi. Sumber daya manusia, sumber daya alam, nilai-nilai budaya (tradisi), yang ada di pedesaan sebetulnya merupakan potensi yang selama ini kurang diposisikan secara strategis dalam proses pembangunan. Orientasi pemerintah selama ini mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga skala prioritasnya lebih ditekankan pada sektor industri di perkotaan.²⁰ Oleh sebab itu, agar program pengentasan kemiskinan lewat Gerakan Kembali Ke Desa atau Bangga Suku Desa bisa sukses, maka dengan itu ditegaskan tiga prinsip : GKD harus berpusat pada rakyat, berorientasi pada praakarsa, dan perbedaan lokal serta berorientasi kepada pemberdayaan.

Dalam program GKD tidak berdiri sendiri tetapi dibantu dengan adanya pengembangan satu desa binaan. Yakni yang terjadi di Bojonegoro tepatnya di Desa Kedungrejo Kecamatan Bander Bojonegoro, desa tersebut mendapat bantuan uang sebesar Rp 5.000.000,-. Di Desa Kedungrejo nantinya akan dibangun kawasan wisata desa, dengan dipenuhi pusat perbelanjaan, rekreasi dari kelas bawah hingga atas, seperti kolam renang, tenis lapangan dan padang golf, pusat kesenian/tari dan perpustakaan/pusat informasi. Di Desa Kedungrejo ada 751 rumah penduduk. Rumah yang direhab ada 560 sedangkan yang di rehap total ada 400 rumah, selain dengan plesterisasi warga juga dibantu sejumlah ternak ayam bagi yang ingin berternak, jika ingin berjualan maka akan dibantu modalnya. Tidak hanya di Ponorogo saja tetapi

¹⁴ “One Village, One Product basofi Bukan Suatu Impian”, *Surya*, 7 Juni 1995, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁶ “Basofi, GKD dan umat Islam”, *Surya*, 5 Oktober 1995, hlm. 6.

¹⁷ “GKD Tak Semudah Membalikan Telapak tangan”, *Surya*, 4 November 1995, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁹ “IDT, GKD, Dan Mudik Lebaran”, *Surya*, 30 Januari 1996, hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, hlm. 6.

juga di Sidoarjo yakni banyak desa-desa yang membuat tas, sepatu, ikat pinggang dan lain-lainya juga dibina dalam desa binaan karena desa-desa tersebut menghasilkan suatu barang kerajinan dan banyak dikenal oleh masyarakat banyak.

3. Dana Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh merupakan gerakan dana yang di rancang oleh presiden Soeharto yang harus di sukseskan. Di Jawa Timur terdapat sekitar 120.000,- anak lulusan SD, yang tidak mampu melanjutkan ke bangku SLTP, dari jumlah tersebut 80%-nya di sebabkan orang tuanya tidak mempunyai biaya sekolah untuk anaknya.²¹

Berdasarkan data di Kanwil Depdikbud Jawa timur setiap tahunnya angka lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, mencapai 20% dari jumlah lulusan. Penyebabnya bermacam-macam, diantaranya ada yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Tetapi sebagian besar disebabkan faktor ekonomi orang tua, sehingga anak yang bersangkutan tersebut tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Dan kebanyakan anak tersebut disuruh membantu mencari nafkah untuk mendukung perekonomian keluarganya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka pemerintah Jawa Timur memberikan dana GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Program orang tua asuh atau pemberian beasiswa telah banyak dilakukan di Jawa Timur. Khususnya kalangan pengusaha dan perusahaan. Hanya saja program tersebut dilakukan sendiri-sendiri dan sifatnya sporadis, sehingga sasarannya kurang tepat.²²

Dana GNOTA pertama kali disalurkan kepada 200 pelajar SD/MI dan SMP/MTS di wilayah Kabupaten Malang, dana GNOTA merupakan dana sumbangan dari kalangan pengembang perumahan di Jawa Timur. Anak asuh yang menjadi sasaran GNOTA tersebar di 1.688 SD/MI Negeri maupun swasta. Di Kabupaten Malang SD/MI mencapai 311.736 pelajar. Sedangkan siswa yang mendapat dana GNOTA di jenjang pendidikan lanjut pertama tersebar di 341 SMP/MTS Negeri maupun swasta. Secara keseluruhan, siswa lanjut pertama di Kabupaten Malang mencapai 84.585 pelajar. Untuk membiayai anak asuh lewat dana GNOTA, baik di tingkat SD maupun SLTP, pemerintah daerah Kabupaten Malang mengalokasikan dana sebesar Rp 22 Miliar, dana tersebut digunakan untuk menyekolahkan 22.000 siswa SD/MI dan SMP/MTS secara berkesinambungan selama Sembilan tahun wajib belajar.²³

Pada tahun ajaran 1997/1998 Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) di Jawa Timur akan menyalurkan sebanyak 9.718 paket kepada siswa-siswi SD/SMP. Sebanyak 90 paket telah di salurkan kepada siswa-siswi SD/SMP di Surabaya, Sidoarjo, dan Kodya Mojokerto. Paket tersebut berisi alat-alat sekolah dan seragam senilai Rp 15.000,- dan uang Rp 45.000,- untuk

siswa SD. Dari 37 Dati II, ada 6 Dati II yang belum membentuk GNOTA yakni Surabaya, Kodya Malang, Kodya Pasuruan, Situbondo, Bondowoso, serta Gresik.²⁴

B. Kendala Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan

Suatu program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah selalu memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program IDT mengalami keterlambatan dalam pencairan dana tersebut yakni disebabkan adanya ketidak siapan aparat dalam melaksanakan proyek yang diharap mengatasi kemiskinan di pedesaan.

Kemudian dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan sendiri oleh Gubernur Basofi Sudirman yakni program GKD (Gerakan Kembali Ke Desa), dalam pelaksanaan program GKD ini memiliki kendala yakni dalam pelaksanaannya banyak wawasan masyarakat desa yang belum memahami manajemen ekonomi dan masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami soal ekonomi dengan segala aturan dan pengeorganisasiannya.. kendala berikutnya yakni belum banyak penduduk desa yang paham tentang GKD, karena program tersebut baru dipahami oleh aparat desa, sedangkan kendala berikutnya yakni sumber daya manusia di pedesaan yang umumnya masih perlu ditingkatkan.

Dalam pelaksanaan program GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) juga mengalami kendala yakni masih kurangnya dana bantuan tersebut sehingga dari 37 Dati II masih ada 6 Dati II yang belum membentuk GNOTA. Sedangkan dalam program urunan pengusaha juga memiliki kendala yakni pada saat pencairan program ini banyak pengusaha yang meragukan akan pembentukan program tersebut, pada saat menanggapi gagasan Gubernur pengusaha yang semula sempat bingung dan akhirnya menyetujui gagasan Gubernur tersebut.

4. Hasil Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan

1. Bidang Sosial

Salah satu bentuk ketidakadilan dari suatu yang mendasar bahwa banyak keluarga yang lebih banyak memiliki pendapatan, kekuasaan, dan kekayaan dari orang lain. Banyak di Negara berkembang seperti di Indonesia bahwa ketidaksetaraan sangat menonjol. Setiap program yang dibuat oleh pemerintah selalu memberikan hasil yang dapat di capai bagi masyarakat. Seperti program yang dicanangkan oleh pemerintah dan Daerah yang dicanangkan sendiri oleh Gubernur Jawa Timur yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Program pengentasan kemiskinan kebanyakan yang dicanangkan pusat dan pemerintah daerah. Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pusat yakni IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang mana Program Inpres

²¹ "Basofi Serahkan Dana Anak Asuh, Surabaya Post, 19 Juni 1997, hlm. 4.

²² Ibid, hlm. 4

²³ "Dana GNOTA Dari Pengembang Diserahkan", Surabaya Post, 8 Agustus 199, hlm. 5.

²⁴ "GN-OTA Jatim Salurkan 9.718 Paket Sekolah", Memorandum, 18 Agustus 1997, hlm. 10.

Desa Tertinggal yang merupakan bantuan simpan pinjam modal bagi masyarakat miskin yang membutuhkan dan digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu dan modal dana untuk membuka usaha yakni mensejahterahkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sejahtera dan hidup layak, dan memiliki dalam sosial dalam menjalani kehidupan. Kemudian program pengentasan yang dicanangkan sendiri oleh Gubernur Basofi Sudirman yakni Program GKD (Gerakan Kembali Ke Desa) program ini merupakan program yang diharapkan mampu menghasilkan satu produk khas desa yang memiliki tujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat desa tersebut. Kemudian ada Program GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) program ini merupakan program bantuan sekolah untuk anak-anak SD/SMP se Jawa Timur yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan sekolah sampai 9 tahun wajib belajar. Kemudian ada program Urutan Pengusaha program ini memang dicanangkan langsung oleh Gubernur Basofi Sudirman yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan cara para pengusaha mengadakan urutan selama 2 tahun. Salah satu bentuk keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan tersebut yakni dengan menurunnya angka kemiskinan di Jawa Timur. Berikut ini adalah uraian data dari BPS tahun 1998 menurunnya angka kemiskinan di Jawa Timur.

Tingkat kesejahteraan masyarakat menurut indikator yang telah ditentukan oleh BPS merupakan salah satu tujuan Program pengentasan kemiskinan tersebut selain dilihat dari tingkat pendidikan juga dilihat dari pelaksanaannya. Dampak yang diberikan pada program pengentasan kemiskinan ini yakni membuat masyarakat sejahtera dan sedikit demi sedikit bisa maju dalam tingkat perekonomiannya. Dampak yang diberikan dalam program IDT yakni banyaknya masyarakat yang membuka usaha untuk merubah perekonomiannya, meningkatkan sebagian besar ekonomi keluarga penerima dana. Sedangkan bagi masyarakat luas dampak dari pelaksanaan program IDT ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Yang bersifat positif yakni berkurangnya sistem renternir di lingkungan warga yang menerima dana IDT. Ketidakpastian harga hewan ternak, khususnya di wilayah pedesaan.²⁵ Sedangkan dampak yang diberikan oleh program GKD yakni memunculkan keterampilan pada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bidang Ekonomi

program Pengentasan Kemiskinan sendiri membawa pengaruh dalam ekonomi. Dalam segi ekonomi dapat dilihat bahwa dengan adanya Program pengentasan kemiskinan pada masa Gubernur Basofi Sudirman banyak mempengaruhi industri kecil/industri rumah tangga yang ada di Provinsi Jawa Timur dan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang berada di wilayah Jawa timur yang mendapatkan dana bantuan baik dari pemerintah, daerah dan pengusaha tersebut. Dan inilah salah satu

tujuan dari Program Program pengentasan kemiskinan yakni mensejahterahkan masyarakat miskin. Sehingga mengurangi masyarakat miskin dan pengangguran. Perkembangan teknologi

Dari Data tabel di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 1995 jumlah nilai produksi lebih unggul sebanyak 20.098.800 sedangkan yang paling rendah yakni jumlah unit usaha sebanyak 489.262. pada 2 tahun kemudian banyak industri di Jawa Timur yang meningkat dan peningkatan yang drastic terjadi pada jumlah nilai produksi yakni meningkat sebanyak 23.360.356.

Dengan bertambahnya jumlah industri kecil maka akan menambah Produk Domestik Regional Bruto (PDBR). PDBR sendiri merupakan salah satu indikator yang terpenting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDBR pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang telah dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.²⁶ Dengan meningkatnya jumlah industri kecil juga berpengaruh pada laju pertumbuhan PDBR sektor industri kecil/rumah tangga.

uraian di atas dapat dilihat bahwa keadaan industri yang ada di Jawa Timur mengalami peningkatan dan dampak yang diberikan oleh program pengentasan kemiskinan ini sangat baik dalam ekonomi masyarakat Jawa Timur. Sehingga membuat banyak kelompok industri yang mengalami peningkatan walau peningkatannya tidak cepat. Dapat dilihat juga bahwa sudah banyak tenaga kerja yang diserap sehingga pengangguran terbuka sudah mulai berkurang. Dengan adanya program pengentasan kemiskinan ini memberikan hasil yang cukup bagus dalam dunia usaha masyarakat yang awalnya masih sedikit kini sudah menjadi banyak dan berkembang lebih baik. Dari adanya peningkatan pada usaha-usaha masyarakat Jawa timur juga mempengaruhi pada pendapatan masyarakat di Jawa timur. Berikut ini adalah data pendapatan per kapita di Jawa Timur pada saat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dimulai dan sesudah program tersebut dilaksanakan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hasil yang diberikan oleh program Pengentasan Kemiskinan pada masa Gubernur Basofi Sudirman dari segi ekonomi terlihat sekali kemajuannya. Jumlah industri kecil dan pendapatan per kapita penduduk di Jawa Timur yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Keberhasilan yang dicapai dari program pengentasan kemiskinan ini lumayan sangat bagus.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka peneliti simpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pada masa Gubernur Basofi Sudirman. Program pengentasan kemiskinan yang terbagi menjadi 2 yakni program

²⁵ Muhammad Asfar, *Pemanfaatan Dana IDT (Inpres Desa Tertinggal) : Studi Implementasi Program IDT Di Kabupaten Pasuruan dan Kodya Surabaya*. Laporan Penelitian, hlm. 75.

²⁶ Jawa Timur Dalam Angka 1997. *Produk Domestik Regional Bruto*.

pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan dijalankan di Jawa Timur pada masa Gubernur Basofi Sudirman yakni Program Pengentasan IDT (Inpres Desa Tertinggal), kemudian Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan sendiri oleh pemerintah Daerah yakni Program GKD (Gerakan Kembali Kedesra), Program GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh), dan Program Urutan Pengusaha.

Program IDT merupakan Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Program ini memberikan dana bantuan kepada masyarakat miskin yang ada di desa tertinggal. Program ini memberikan pinjaman modal usaha sebesar 20 juta. Sasaran dalam Program IDT adalah masyarakat berpenghasilan rendah sekitar 60% dari 4.747- 459 jiwa, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh tani, buruh gudang, tukang ojek, dan becak, kuli bangunan, penangguran, dan pengangguran tak kentara. Dana yang diberikan kebanyakan digunakan oleh kelompok miskin banyak digunakan untuk membeli ternak seperti ternak kambing, ayam dan itik. Dalam pelaksanaan program ini tidak selamanya berjalan lancar, dalam program ini selalu terjadi banyak kendala diantaranya pada saat penyaluran. Dana IDT ini banyak pemerintah daerah yang menyunat dana tersebut. Sehingga dana yang turun tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya.

Program berikutnya adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur yakni Program GKD (Gerakan Kembali ke Desa) program ini adalah program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Timur yakni Gubernur Basofi Sudirman. Program GKD adalah suatu program yang mengangkat potensi suatu desa untuk dijadikan produk unggulan desa tersebut. Tujuan dari program ini adalah ingin menciptakan masyarakat yang berpotensi dan ingin menciptakan sumber daya desa agar lebih maju. Anggaran dana program GKD ini swasta. Dalam pelaksanaan program ini juga banyak menjumpai kendala-kendala yakni dengan pelaksanaan program ini banyak penduduk desa yang belum banyak memahami tentang program GKD tersebut. Sehingga membuat pemerintah lebih intensif dalam memberikan pengertian program ini. Kemudian kendala berikutnya adalah sumber daya manusia di pedesaan yang umumnya masih perlu terus ditingkatkan lagi.

Program GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) adalah program yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto. Program ini memberikan dana bantuan kepada siswa yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Sehingga pemerintah memberikan bantuan kepada siswa yang tidak melanjutkan sekolah agar bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena pada tahun itu sudah ditetapkan wajib belajar 9 tahun. Sehingga anak SD yang tidak bisa melanjutkan akan diberi bantuan dana tersebut. Program berikutnya yang dicanangkan oleh Gubernur Basofi adalah program Urutan Pengusaha atau yang bisa disebut dengan arisan. Program ini dicanangkan untuk membantu masyarakat miskin terutama kalangan

anak-anak usia wajib belajar sebagai anak asuh dan kepada para orang tua Lanjut Usia (Lansia) di Jawa Timur. Cara pengumpulan dana, yakni untuk 4000 nomor setiap nomornya bernilai Rp 250.000,-. Dengan begitu dana yang terkumpul berjumlah Rp 1 Milyar dan akan disimpan di bank. Dan bunganya nanti akan digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga uang para pengusaha tersebut akan tetap dan tidak berkurang.

Sebuah program pasti menghasilkan hasil yang diharapkan, tidak terkecuali pada program pengentasan kemiskinan tersebut. Hasil yang ditimbulkan dari program pengentasan kemiskinan yakni hasil dalam bidang sosial dan bidang ekonomi. Yang pertama, dalam bidang sosial dari program pengentasan kemiskinan ini dapat menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur serta dalam dunia pendidikan menghasilkan peningkatan jumlah siswa-siswi di Jawa Timur. Serta dengan program pengentasan kemiskinan juga merubah perilaku masyarakat Jawa Timur. Dengan adanya program pengentasan ini banyak masyarakat yang mulai mengembangkan usahanya dan tidak bergantung pada renternir, dan menjadikan masyarakat yang partisipatif dan peduli terhadap kondisi orang lain yang sangat membutuhkan.

Kedua, hasil dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi hasil yang dicapai dari program pengentasan kemiskinan yaitu meningkatkan jumlah industri kecil yang ada di Jawa Timur dari tahun ke tahun sejak dicanangkan program-program pengentasan kemiskinan. Dengan meningkatnya jumlah industri maka akan mempengaruhi laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor-sektor industri yang ada di Jawa Timur. Laju pertumbuhan PDRB di Jawa Timur dari tahun ke tahun juga meningkat. Dari PDRB juga mempengaruhi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita inilah yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari kedua hasil yang dicapai diatas, terlihat bahwa Program Pengentasan Kemiskinan yang ada di Jawa Timur berhasil. Usaha yang dilakukan oleh Gubernur Basofi Sudirman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dapat tercapai. Keberhasilan ini juga diperoleh dari dukungan masyarakat Jawa Timur.

B. Saran

Banyak manfaat yang didapat dari pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Dengan adanya Program pengentasan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yakni program IDT yang perlu di koreksi lagi dalam pelaksanaannya. Seharusnya besar dana IDT yang diberikan pada masing-masing penduduk miskin hendaknya sesuai dengan kebutuhan minimal masyarakat tersebut. Baik dalam hal membuka usaha atau sebagainya.

Ide yang digagas oleh Basofi Sudirman patut dijadikan contoh untuk pemerintah di dalam menerapkan kebijakan. Alangkah baiknya, jika program yang dicanangkan oleh Basofi Sudirman diteruskan kembali. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian sosial pada masyarakat di Jawa Timur. Apabila ada program yang serupa dengan program yang dicanangkan oleh Basofi Sudirman yang diterapkan

kembali, tentulah tumbuh sedikit demi sedikit rasa kepedulian terhadap sesama. Dan membantu masyarakat yang tidak mampu dalam masalah perekonomian.

Hal yang perlu digarisbawahi dalam program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur yakni adanya keterpaduan langkah. Sebab Provinsi ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 32,8 juta jiwa sehingga harus membentuk Pusat Pengendalian Pengentasan Kemiskinan (Pusdal taskin). Dengan demikian program pengentasan kemiskinan yang dilakukan sejumlah instansi bisa saling menunjang dan terprogram secara jelas.

Perlu adanya program-program pengentasan kemiskinan yang lebih bagus dan baik dalam pengentasan kemiskinan dan lebih ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik. 2000. *Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Timur 1995-1999*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Dunia. 2011. *Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur*. Jakarta: Kantor Bank Dunia Jakarta.
- BPS 1993. *Jawa Timur dalam Angka*.
- BPS 1994. *Jawa Timur dalam Angka*.
- BPS 1995. *Jawa Timur dalam Angka*.
- BPS 1996. *Jawa Timur dalam Angka*.
- BPS 1997. *Jawa Timur dalam Angka*.
- BPS 1998. *Jawa Timur dalam Angka*.
- Depdikbud. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia Utama.
- Kasdi, Aminuddin. 2011. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press.
- Kementerian komunikasi dan informatika RI Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*. Jakarta : Kementerian komunikasi dan informatika RI Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan 2012. *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK)*. Jakarta : Balai Pustaka.
- L. Pasaribu, I. 1986. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : TARSITO.
- Poesponegoro dan Nugroho N. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sholihin, Dadang. 2014. *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta : Yayasan Empat Sembilan Indonesia.

Sjafari, Agus. 2012. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soeradji, dkk. 1998. *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Laporan Penelitian Daerah-Daerah*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sudrajat. 2005. *Kiat Mengentaskan Pengangguran Melalui Wirausaha*. Jakarta : Bumi Aksara.

Suharto, Edi. 2009. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung : ALFABETA.

Sumodiningrat, Gunawan. 1995. *Program Inpres Desa Tertinggal: Kebijaksanaan Dan Arah Baru Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Yudistira.

Wahyudi, Ari, Pambudi Hadoyo, Arief Sudrajat. 2016. *Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya : Unesa University Press.

Jurnal

- Darwis. Valeriana, dan A. Rozany Nurmanaf, "Pengentasan Kemiskinan : Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang", *Jurnal FAE*, Volume 19, No. 1. 2001.
- Jonaidi, Arius, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indoneisa", *Jurnal Kajian Ekonomi*, Volume 1, No. 1. 2012
- Listyana, Henny, "Program Gerakan Dana Masyarakat (GERDAMAS) Di Surabaya Tahun 1995-1999", *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 4, No. 2. 2016
- Mawardi, Abun, "Peran Institusi Lokal Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Perkotaan", *Jurnal WACANA*, Volume 10, No. 1. 2009.
- Mustika, Candra, "Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008", *Jurnal Paradigma Ekonomi*, Volume 1, No. 4. 2011.
- W, I G Murjana Yasa, "Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Bali", *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*. Volume 1, No. 2. 2008.

Dokumen

- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, (online), (www.hukumonline.com), diakses dan diunduh pada 07 November 2017)
- Lampiran Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 Tanggal 27 Desember 1993 Tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, (online), (www.hukumonline.com), diakses dan diunduh pada 07 November 2017)

Koran dan Majalah

Bhirawa, 15 Juni 1996

Bhirawa, 11 November 1997

Jawa Pos, 15 Oktober 1993

Jawa Pos, 5 Januari 1996

Jawa Pos, 23 Februari 1996

Jawa Pos, 30 Juni 1996

Karya Darma, 2 Mei 1994

Karya Darma, 7 September 1994

Memorandum, 18 Agustus 1997

Memorandum, 8 Mei 1998

Suara Karya, 22 Januari 1994

Surabaya Post, 19 Agustus 1993

Surabaya Post, 20 Juni 1994

Surabaya Post, 6 Juli 1994

Surabaya Post, 7 Juli 1994

Surabaya Post, 14 Juli 1994

Surabaya Post, 27 Juli 1994

Surabaya Post, 29 Agustus 1994

Surabaya Post, 22 September 1994

Surabaya Post, 19 Juni 1997

Surabaya Post, 8 Agustus 1997

Surya, 7 Juni 1995

Surya, 5 Oktober 1995

Surya, 4 November 1995

